



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kontribusi Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia Dalam Misi
Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB Di MONUSCO**

Skripsi

Oleh

Vanessa Vicario Adhitanata

2017330164

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Vanessa Vicario Adhitanata
Nomor Pokok : 2017330164
Judul : Kontribusi Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia Dalam Misi
Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB di MONUSCO

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 22 Desember 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Mireille Marcia Karman, M.Litt. : 


Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D : 

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D. : 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanessa Vicario Adhitanata
NPM : 2017330164
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kontribusi Pasukan Perempuan Indonesia dalam Misi
Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB di MONUSCO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan berikut tidak benar.

Bandung, 1 Desember 2021



Vanessa Vicario Adhitanata

2017330164

ABSTRAK

Nama : Vanessa Vicario Adhitanata
NPM : 2017330164
Judul : Kontribusi Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam Misi
Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB di MONUSCO

Dengan adanya isu pelecehan dan kekerasan pada perempuan serta anak – anak di Kongo, PBB sebagai organisasi yang berkomitmen untuk menjaga keamanan internasional meyakini bahwa kontribusi aktif pasukan perempuan dalam MPP dapat membantu mencapai mandat PBB, yaitu mencapai perdamaian dunia. Indonesia merespon mandat tersebut dengan mengirimkan pasukan perempuannya ke Kongo. Pertanyaan penelitian berupa “Bagaimana Bentuk Kontribusi Pasukan Perempuan Indonesia Dalam Meningkatkan Peran Perempuan di MPP PBB MONUSCO” dideskripsikan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada teori liberalisme institusionalis, konsep *peacekeeping* menurut PBB serta konsep *women empowerment* berdasarkan Kabeer. Penelitian ini menemukan 4 bentuk kontribusi Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam MPP PBB di MONUSCO, yaitu: Perlindungan Masyarakat / *Protection of Civilians* (POC), *Civil and Military Cooperation* (CIMIC) dan *Community Engagement*, Pemberdayaan Perempuan, serta *Disarmament, Demobilization, Reintegration* (DDR). Bentuk kontribusi tersebut dijalankan melalui komunikasi secara terbuka antara sesama perempuan sebagai bagian dari bentuk POC, pemberian pelayanan kesehatan gratis, pemberian edukasi, pengenalan budaya Indonesia, serta patroli pasukan perempuan bersama dengan pasukan laki-laki sebagai bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui level-individu dan level-komunitas.

Kata kunci: Indonesia, pasukan perempuan, MPP PBB, kontribusi, MONUSCO

ABSTRACT

Name : Vanessa Vicario Adhitanata

NPM : 2017330164

Title : The Contribution of Indonesian Women Peacekeepers in United Nations Peacekeeping Mission in MONUSCO

Within the existence of harassment and violence against women and children in Congo, international organization such as United Nations believes that the active contribution of female peacekeepers in peacekeeping mission may assist UN to achieve their mandate, namely the world peace. As a response to the UN's mandate, Indonesia participated by sending their female troops to Congo. Research question: "How is the Contribution of Indonesian Female Peacekeepers in Improving the Role of Women in UN Peacekeeping Operation MONUSCO", described using qualitative methods based on liberalism institutionalist theory, the concept of peacekeeping according to UN and women empowerment by Kabeer. There are 4 contributions found within this research; Protection of Civilians (POC), Civil and Military Cooperation (CIMIC) and Community Engagement, Women's Empowerment, and Disarmament, Demobilization, Reintegration (DDR). Contributions are carried out through open communication between fellow women as part of POC, free health services, free education, acquaint Indonesian culture, and female peacekeepers patrols along with male peacekeepers as a way to empower other women, both through individual and community level.

Key words: Indonesia, female peacekeepers, UN Peacekeeping Operations, Contribution, MONUSCO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kebaikannya, kesetiannya, penyertaannya, dan kasih karuniannya saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Kontribusi Pasukan Perdamaian Perempuan Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB di MONUSCO**”. Tentu tanpa penyertaannya, penulis tidak mampu menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang tepat.

Skripsi ini ditulis untuk mencari tahu bagaimana kontribusi Indonesia dalam meningkatkan peran perempuannya melalui MPP PBB MONUSCO. Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi terhadap studi Ilmu Hubungan Internasional, serta menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai Perempuan Indonesia dalam perdamaian dunia. Di lain sisi, penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan meminta maaf atas kekurangan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini. Akhir kata, penulis terbuka atas kritik, saran, serta rekomendasi yang bersifat membangun.

Bandung, 1 Desember 2021

UCAPAN TERIMAKASIH

- Ucapan terimakasih pertama saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikanNya, kasih setiaNya, serta penyertaanNya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya tepat pada waktunya. Meskipun terkadang diiringi rasa *insecure* yang berlebihan.
- Saya berterima kasih untuk papa yang telah menuntun dan membimbing serta membiayai saya dari awal masuk kuliah sampai berhasil menyelesaikan skripsi.
- Saya berterima kasih untuk kakak dan adik saya yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi, yang selalu menjadi tempat canda tawa saya ketika mumet dalam penyusunan skripsi.
- Saya berterima kasih kepada Fitria, Uni, Hotman, Fai, Uwi yang selalu ada serta mendukung saya dalam penyusunan skripsi. Tempat saya bercerita tentang masalah kehidupan. LUV.
- Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Mas Pur, yang selalu bercanda namun serius di saat yang bersamaan, dan selalu membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
- Saya berterima kasih kepada teman-teman anak bimbingan Mas Pur yang selalu menyemangati satu sama lain dan saling mengingatkan akan situasi 911.
- Saya berterima kasih kepada Mba Indri yang bisa saya ajak diskusi mengenai peran perempuan serta memberikan bahan referensi.

- Saya berterima kasih kepada dosen penguji serta seluruh staff UNPAR yang membantu saya perihal administrasi dari awal saya masuk sampai lulus.
- *Last but not least, I wanna thank me*
I wanna thank me for believing in me
I wanna thank me for doing all this hard work
I wanna thank me for having no days off
I wanna thank me for, for never quitting

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	0
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Pembatasan Masalah	4
1.2.3 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kajian Literatur	6
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.1 Metode Penelitian	17
1.6.2 Jenis Penelitian	18
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19
BAB II: MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN (MPP) PBB	21
2.1 Tujuan dan Pinsip Dasar Pengiriman MPP PBB	21
2.1.1 Latar Belakang dan Tujuan	22

2.1.2 Kerangka Legal Pelaksanaan MPP PBB	27
2.1.3 Prinsip Dasar Pelaksanaan Tugas MPP PBB	32
2.2 Pengiriman MPP PBB	34
2.3 Kontribusi Pasukan Perempuan Dalam MPP	39
2.3.1 Pentingnya Pasukan Perempuan	39
2.3.2 Kekuatan Pasukan Perempuan Dalam MPP	40
2.3.3 Tantangan Pasukan Perempuan Dalam MPP	44
BAB III: KONTRIBUSI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PASUKAN PEREMPUAN DI MPP PBB	48
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Indonesia Dalam MPP PBB	49
3.1.1 Dasar Hukum dan Kepentingan Nasional Indonesia	50
3.1.2 Pertimbangan Indonesia Dalam Mengirimkan Pasukan Perempuan	52
3.1.3 Mekanisme Pengiriman Pasukan Indonesia ke MPP	57
3.2 Kesiapan Indonesia Dalam Pengiriman Pasukan MPP PBB	61
3.2.1 Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP)	62
3.2.2 Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI	63
3.3 Indonesia Sebagai Inisiator Resolusi DK 2538	64
BAB IV: KONTRIBUSI PASUKAN PEREMPUAN INDONESIA DI MONUSCO	68
4.1. Latar Belakang Konflik di Kongo dan Tujuan Pengiriman Pasukan ke MONUSCO	68
4.2 Kontribusi Pasukan Perempuan Indonesia dalam MONUSCO	73
4.2.1 Perlindungan Masyarakat Sipil (Protection of Civilians)	75
4.2.2 <i>Civil and Military Cooperation</i> (CIMIC) dan	78

<i>Community Engagement</i>	
4.2.3 Pemberdayaan Perempuan	83
4.2.4 <i>Disarmament, Demobilization, Reintegration</i> (DDR)	87
4.3 Evaluasi Tantangan dan Hambatan	90
4.3.1 Budaya	90
4.3.2 Keterlibatan Negara Tetangga (Rwanda dan Uganda)	91
4.3.3 Penerapan Prinsip ' <i>Non Use of Force</i> '	92
BAB V: KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 – Proses Pembedayaan Perempuan	16
Gambar 2.1 – Peta Penyebaran Pengiriman MPP PBB	35
Gambar 3.1 – Alur Pengiriman Pasukan Indonesia ke MPP PBB	58
Gambar 4.1 – Pasukan Perempuan Indonesia Saat Berinteraksi Dengan Masyarakat Sipil	77
Gambar 4.2 – Pasukan Perempuan Indonesia di Kalemie	78
Gambar 4.3 – CIMIC Satgas Konga TNI XXXIX-B RDB MONUSCO Memperkenalkan Budaya Indonesia	80
Gambar 4.4 – Batalyon Gerak Cepat TNI Konga XXXIX-B dalam MPP PBB MONUSCO	81
Gambar 4.5 – Lettu Caj. Nendy Koesey	82
Gambar 4.6 – Kegiatan Bakti Sosial hari Aids Sedunia Satgas TNI Konga XXXIX-B RDB MONUSCO	87
Gambar 4.7 – Kegiatan Bakti Sosial berbagi daging kurban oleh Pasukan Perempuan Satgas Indo RDB XXXIX-B MONUSCO	89
Gambar 4.8 – Ketua Milisi Kongo Ketika Serahkan Diri dan Alat Perangnya ke Satgas Indo RDB MONUSCO di Provinsi Tanganyika	89
Gambar 4.9 – Satgas Indo RDB MONUSCO Gelar Pameran Layanan Kesehatan Gratis	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 – Pengiriman MPP PBB	25
Tabel 2.2 – Jumlah Pasukan Militer dan Polisi di 12 Operasi MPP	37
Tabel 4.1 – Kekerasan Seksual dan Eksploitasi yang Dilakukan Personel MPP di MONUSCO (2016 – 2020)	71
Tabel 4.2 – Data Kasus Pelecehan Seksual Per Bulan Tahun 2020 – 2021 di Kongo	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi dalam era globalisasi sekarang ini umumnya melibatkan banyak faktor, seperti aktor negara maupun aktor non-negara. Tentunya, hal ini berarti bahwa fokus suatu negara pun ikut meluas. Berbagai faktor multidimensional, seperti faktor ekonomi, sosial, maupun budaya, dapat mempengaruhi eksistensi perdamaian serta keamanan dunia. *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan sebuah organisasi internasional yang berdiri sejak tahun 1945 sebagai wadah bagi anggotanya untuk menyelesaikan suatu konflik dan mencapai perdamaian.¹ Untuk itu, PBB menghadirkan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) sebagai alat bantu negara yang berkonflik untuk mencapai perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan.²

Politik seringkali dikaitkan dengan dominasi peran laki-laki dan selalu memiliki pandangan berdasarkan perspektif patriarki. Politik yang tadinya merupakan wadah bagi masyarakat sebagai tempat untuk bermusyawarah, berubah menjadi tempat kekuasaan yang semakin mensubordinasikan perempuan. Padahal, keputusan politik tidak hanya berpengaruh di sektor publik, namun juga pada sektor domestik, dimana wanita berperan didalamnya.³ Perempuan seringkali dinomorduakan dalam dunia politik karena dianggap lebih menggunakan perasaan dalam memutuskan sesuatu dan dikhawatirkan dapat menentukan keputusan yang

¹ United Nations. Diakses dari <https://www.un.org/en/about-us/> pada 8 April 2021.

² United Nations. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en> pada 14 Juni 2021.

³ Murniati, A. Nunuk P. 2004. "Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM". Magelang: *Indonesiatara*.

salah. A. Nunuk P. Murniati dalam bukunya yang berjudul *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, bercerita bahwa perempuan Indonesia seringkali dianggap remeh akibat konstruksi sosial budaya.⁴ Perempuan dilihat kurang mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Perempuan juga seringkali dijadikan sebagai sumber masalah karena kurang mampu bersaing akibat kurangnya akses pendidikan. Kentalnya budaya patriarki di Indonesia membuat hak perempuan untuk menentukan hidupnya hilang, dimana perempuan hanya dapat bekerja atas dasar izin suaminya. Hal inilah yang menyebabkan politik pembangunan di Indonesia kurang.

Dalam memelihara dan menjaga perdamaian di era globalisasi sekarang ini, PBB sangat mengedepankan keterlibatan perempuan. Dalam konteks keamanan manusia dan perdamaian, kehadiran perempuan diyakini dapat menjadi faktor yang sangat penting untuk mendorong keberhasilan misi perdamaian. Perempuan yang seringkali dinomorduakan dapat menjadi wadah komunikasi antara masyarakat di wilayah yang berkonflik, seperti contohnya pasukan perempuan yang dikirimkan untuk menjalankan mandat MPP PBB. Melalui peran perempuan, perempuan, anak-anak, dan seluruh penduduk di daerah konflik terjamin keselamatannya serta tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.⁵

Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai kontribusi pasukan Indonesia dalam MPP PBB, termasuk peran pasukan perempuan Indonesia dalam mencapai MPP PBB. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat membuka

⁴ *Ibid.*

⁵ Hadi, Rany Purnama dan Sartika Soesilowati. 2018. "The Role of Women in Security Indonesian Women Peacekeepers in the UNIFIL: Challenges and Opportunities". Surabaya: *Universitas Airlangga*, hal. 381.

wawasan masyarakat bahwa Indonesia dapat memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Keberhasilan sebuah negara dalam mewujudkan misi perdamaian dunia dapat ditentukan dari seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh negara tersebut, termasuk implementasi kebijakan luar negerinya.⁶ Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif yang didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea IV. Prinsip bebas aktif ini diperlihatkan melalui kontribusi aktif Indonesia dalam menjalankan MPP PBB. Tidak hanya mengirimkan pasukan perdamaian ke beberapa daerah konflik saja, Indonesia juga meningkatkan kinerja pasukannya dengan menghadirkan peran pasukan perempuan. Meskipun perempuan Indonesia seringkali dinomorduakan, fakta menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi besar dalam mengirimkan pasukan perempuannya. Dibuktikan dengan Resolusi 2538 yang membahas tentang *Women in Peace Operation* yang berhasil disahkan oleh DK PBB pada 28 Agustus 2020 dan didukung oleh negara anggota PBB lainnya sebagai "*Presidential Text*".⁷ Indonesia juga ikut berkontribusi dalam penyusunan draft deklarasi dalam inisiatif program *Action for Peacekeeping (A4P)* yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB tahun 2015 – 2019. Deklarasi A4P memiliki 8 area komitmen

⁶ Hutabarat, Leonardo F. 2017. "Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission". *Jurnal Pertahanan Vol.3 No.3*, hal. 189.

⁷ Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. 2020. "Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian". *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*, hal. 12.

prioritas, yang didalamnya mendorong peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan internasional.⁸

Dalam pertemuan DK PBB pada bulan Mei 2020 dengan tema Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB di New York, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan bahwa perempuan memegang peranan penting di dalam pencegahan konflik, manajemen konflik, dan bina damai pasca konflik.⁹ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB pada Oktober 2020, Indonesia telah berhasil mengirimkan 2.828 personel yang 163 diantaranya merupakan personel perempuan.¹⁰ Personel tersebut dikirimkan ke 12 MPP PBB, seperti UNIFIL di Lebanon, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, UNAMID di Darfur-Sudan, MINUSMA di Mali, UNMISS di Sudan Selatan, UNISFA di Abyei, UNMIK di Kosovo, UNFICYP di Cyprus, UNMOGIP di India dan Pakistan, UNDOF, UNTSO, UNMISS di Sudan, serta MINURSO di Sahara Barat.

Pasukan perempuan Indonesia yang dikirimkan ke MONUSCO cukup memberikan kontribusi banyak bagi keberhasilan MPP PBB di Kongo, khususnya dalam menangani kasus pelecehan seksual dan eksploitasi serta pemberdayaan perempuan. Perempuan yang seringkali dinomorduakan ternyata berpengaruh besar bagi keberhasilan pelaksanaan mandat MPP PBB. Untuk itu, diperlukan dorongan

⁸ *Ibid*, hal. 14.

⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Menlu RI Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB: Mayor Asal Indonesia Jadi Inspirasi". Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/i/read/250/view/menlu-ri-pimpin-sidang-dewan-keamanan-pbb-mayor-asal-indonesia-jadi-inspirasi> pada 10 April 2021 pada 9 April 2021.

¹⁰ Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Loc.cit, hal. 21.

masyarakat internasional untuk menguatkan peran perempuan dalam penanganan perdamaian dan keamanan nasional.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah difokuskan pada kontribusi Perempuan Indonesia dalam MPP PBB MONUSCO di tahun 2018 – Agustus 2021. Dalam kurun waktu tersebut Indonesia berkontribusi aktif dalam PBB dengan mengirimkan pasukan perempuan yang jumlahnya sampai sekarang terus meningkat serta membawa perubahan signifikan bagi MPP PBB Kongo, sejak PBB menargetkan 15% partisipasi perempuan pada tahun 2018. Paradigma liberalisme institusionalis, konsep *peacekeeping* dan konsep pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) digunakan untuk membantu menjelaskan penelitian ini. Kontribusi Perempuan Indonesia dalam MONUSCO dijadikan objek penelitian untuk membuktikan bahwa Perempuan Indonesia yang seringkali dinomorduakan dapat membawa pengaruh yang signifikan bagi perdamaian dunia di Kongo, termasuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai bentuk pemberdayaan di MPP MONUSCO.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, maka, perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana Bentuk Kontribusi Pasukan Perempuan Indonesia Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di MPP PBB MONUSCO?”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk kontribusi pasukan perempuan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi perempuan di MPP PBB MONUSCO, khususnya dalam kurun waktu 2018 – Agustus 2021.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini yang diharapkan dapat menambah referensi serta wawasan mengenai kontribusi Indonesia dalam MPP, khususnya melalui kontribusi pasukan perempuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang memiliki ketertarikan terhadap kontribusi perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.

1.4 Kajian Literatur

Kajian literatur atau studi literatur menurut Rosady Ruslan, merupakan studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku – buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini ada 3 kajian literatur berupa artikel jurnal yang digunakan.

Artikel jurnal yang pertama ditulis oleh Satwika Paramasatya dan berjudul *“Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus*

¹¹ Ruslan, Rosady. 2008. “Manajemen Public Relations & Media Komunikasi”. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Operasi Perdamaian MONUSCO."¹² Paramasatya berargumen bahwa pergeseran konflik selama 20 tahun terakhir yang mulai melibatkan berbagai aktor non-negara, menghadirkan berbagai pendekatan yang bersifat multidimensional seperti pendekatan yang bersifat humanis. Salah satu caranya dengan menghadirkan pendekatan gender yang meyakini bahwa peran wanita sangat penting bagi keberlangsungan mandat MPP PBB, serta diatur dalam Resolusi 1325. Hadirnya peran pasukan wanita telah membuktikan bahwa perempuan dapat melaksanakan peran yang sama, standar yang sama, serta berada di bawah tekanan yang sama seperti pasukan laki – laki. Perempuan memiliki peranan unik untuk mengakses kelompok rentan, seperti korban pelecehan seksual dan eksploitasi. Hadirnya pasukan perempuan dalam MPP telah memberikan kontribusi dalam penyusutan kasus kekerasan seksual di Kongo, seperti penerapan UU tentang kekerasan seksual dan peningkatan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pasukan perempuan di MPP melalui pelaksanaan program DDR, CIMIC, dan SSR yang dimaksimalkan persiapannya agar pasukan perempuan dapat menjalankan mandat MPP seperti: akomodasi DDR yang disediakan khusus untuk perempuan; pelatihan berbasis gender dan kekerasan seksual untuk FARDC dan kepolisian di Kongo (PNC) di Ibukota Kinshasa; pemberian modul berbasis gender saat pelatihan; serta *capacity building* bagi Angkatan Bersenjata Kongo yang didalamnya mencakup pengenalan hak wanita. Dengan ini diharapkan jumlah pasukan wanita yang berkontribusi dalam MPP

¹² Paramasatya, Satwika. 2015. "Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian MONUSCO". *Indonesian Journal of International Studies (IJIS) Vol.2 No.1*.

MONUSCO dapat bertambah agar pelaksanaan mandatnya dapat terlaksana dengan baik.

Artikel jurnal kedua yang ditulis oleh Yulia Fadillah, Jonni Mahroza, Harangan Sitorus, dan Risman, berargumen bahwa kehadiran pasukan perempuan Indonesia bertujuan untuk menyeimbangkan dominasi maskulin serta mempromosikan kesetaraan gender dalam MPP PBB.¹³ Perspektif gender dibutuhkan dalam proses rekonsiliasi terhadap wanita dan anak – anak dalam situasi konflik. Pasukan perempuan dipercaya dapat mengubah stigma maskulinitas, dimana mereka dapat berinteraksi dengan komunitas lokal untuk mengakses informasi yang sulit diakses pasukan pria. Indonesia sebagai negara yang berkontribusi aktif dalam pengiriman pasukan MPP memiliki kelompok pasukan perdamaian perempuan yang dikhususkan untuk menangani korban di daerah konflik sebagai bentuk penyembuhan dan rehabilitasi serta diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI No.1/2017 (*Roadmap Vision 4000 Peacekeepers*).¹⁴ Melalui pelaksanaan program POC yang dilakukan oleh pasukan Perempuan Indonesia, dengan mengedepankan kemampuan komunikasi serta negosiasi pasukan, kepercayaan masyarakat perlahan dapat terbangun kembali, termasuk pemberdayaan perempuan. Partisipasi pasukan Perempuan Indonesia dapat mencegah terjadinya *misconduct*, seperti perempuan dan anak – anak yang menerima bantuan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan melalui program DDR dan CIMIC. Kesetaraan gender mempermudah pelaksanaan mandat MPP, seperti rekonsiliasi konflik serta kestabilan politik dan sosial, yang dicapai melalui kontribusi pasukan perempuan dalam meningkatkan kepercayaan

¹³ Fadillah, Yulia, Jonni Mahroza, *et.all.* 2020. “The Role of Indonesia’s Female Peacekeepers in United Nations Peacekeeping Operations to Promote Gender Equality”. Bogor: *Indonesia Defense University, Jurnal Pertahanan Vol.6 No.2*, hal. 121.

¹⁴ *Ibid*, hal. 122.

diri wanita dan anak – anak sebagai korban pelecehan seksual dan eksploitasi di wilayah yang berkonflik.

Sedangkan dalam artikel jurnal yang ketiga, Leonardo F. Hutabarat dalam tulisannya yang berjudul “*Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission*”, kontribusi pasukan perempuan dalam misi perdamaian dunia, seperti polisi, militer, atau pun masyarakat sipil memberikan dampak positif bagi PBB yang didasarkan pada Resolusi PBB 1325 . Perempuan dianggap setara dengan laki-laki dan dapat berkontribusi sepenuhnya bagi pencegahan dan resolusi konflik, bina perdamaian (*peacebuilding*) dan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*) sebagaimana dikatakan oleh Hutabarat: “*The resolution emphasizes the importance of “women’s equal and full participation” as an active agent in conflict prevention and resolution, peace-building and peacekeeping.*”¹⁵ Partisipasi Indonesia dalam MPP PBB didasarkan pada strategi kebijakan politik luar negerinya yang tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea IV – bebas aktif – dimana partisipasi aktif Indonesia dapat meningkatkan daya tarik negara Indonesia dalam dunia internasional, atau dikenal dengan sebutan ‘*soft diplomacy*’.¹⁶ Dengan mengedepankan dan mempertahankan posisinya dalam keamanan internasional, Indonesia dapat meningkatkan derajatnya di mata dunia. Hutabarat berpendapat bahwa pengiriman pasukan perempuan Indonesia dalam MPP PBB sangat dibutuhkan di masa depan. Bukan semata-mata untuk mendukung misi PBB namun juga untuk memperlihatkan partisipasi dan peran aktif perempuan Indonesia sebagai pasukan perdamaian dunia.¹⁷

¹⁵ Hutabarat, Leonardo F. 2017. “Indonesian Female Peacekeepers in The United Nations Peacekeeping Mission”. *Jurnal Pertahanan Vol. 3 No.3*, hal. 189.

¹⁶ *Ibid*, hal. 195.

¹⁷ *Ibid*, hal. 199.

Ketiga kajian literatur diatas menyebutkan bahwa peranan pasukan Perempuan, seperti kontribusi pasukan Perempuan Indonesia, dibutuhkan serta dinilai sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan MPP PBB. Paramasatya berpendapat dalam tulisannya bahwa partisipasi pasukan perempuan dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan mandat MPP, melihat peranan unik pasukan perempuan dalam mengakses kelompok rentan di MONUSCO (korban pelecehan seksual dan eksploitasi). Sedangkan Fadillah, Mahroza, Sitorus, dan Risman, berpendapat bahwa peran pasukan Perempuan Indonesia dapat mempromosikan kesetaraan gender serta mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi di daerah konflik. Dilakukan melalui akses komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan perempuan serta anak – anak korban konflik. Hutabarat juga menekankan bahwa Resolusi DK PBB 1325 menekankan pentingnya kesetaraan dan partisipasi penuh perempuan sebagai sarana untuk mencapai perdamaian dunia, dimana Indonesia telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian meskipun terdapat banyak rintangan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk kontribusi pasukan Perempuan Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan di Kongo, yang diyakini dapat mencapai keberhasilan kinerja MPP PBB di MONUSCO.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Kerangka pemikiran terdiri dari konsep, teori, dan paradigma yang relevan dengan topik penelitian yang sudah ditentukan dan dijelaskan secara

mendalam.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan satu paradigma dan dua konsep untuk membantu menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberalisme Institusionalis. Filsuf John Locke mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, modernitas memproyeksikan kehidupan baru yang lebih baik, bebas dari pemerintah yang otoriter, serta mengarah pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.¹⁹ Fokus dari sebuah negara bukan lagi didasari pada aktor negara atau politik saja, namun juga dapat didasari oleh faktor lainnya seperti ekonomi, teknologi, kemanusiaan, lingkungan, dan faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Liberalisme sendiri memiliki pandangan bahwa segala bentuk kerjasama yang didasarkan pada kepentingan bersama, tentu membuahkan hasil yang baik. Liberalisme juga melihat bahwa modernisasi memperluas fokus kerjasama yang bersifat lintas batas negara, sehingga dibutuhkan peran institusi internasional.²⁰ Argumen liberalisme institusional berusaha untuk menjelaskan bahwa hadirnya institusi dapat mengurangi efek destabilisasi anarki multipolar yang dikemukakan oleh Mersheimer, dimana informasi mengalir secara transparan diantara negara anggota dan meminimalisir adanya ketakutan serta kesalahpahaman. Woodrow Wilson pernah memiliki pandangan untuk mengubah dunia internasional dari ‘hutan’ dengan kekuasaan politik yang kacau ke ‘kebun binatang’ dengan hubungan yang teratur dan damai.²¹ Liberalisme institusional hadir dengan pandangan bahwa

¹⁸ USC Libraries. “Organizing Your Social Sciences Research Paper: Theoretical Framework”. University of Southern California. Diakses dari <https://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework> pada 22 April 2020.

¹⁹ Jackson, Robert and Georg Sorenson. 2013. “Introduction to International Relations: Theories and Approaches”. United Kingdom: Oxford, hal. 100.

²⁰ *Ibid*, hal. 101.

²¹ *Ibid*, hal. 110.

hal demikian dapat dicapai melalui peran organisasi internasional seperti PBB. Kehadiran organisasi internasional tersebut dapat mendorong kerjasama antar negara untuk mencapai perdamaian. Untuk itu, PBB menjadikan MPP sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk membantu negara dengan keadaan yang selalu berkonflik demi terciptanya perdamaian.

Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *peacekeeping* atau pemeliharaan perdamaian yang dikemukakan oleh PBB. *Peacekeeping* merupakan salah satu aktivitas di bawah naungan PBB dengan tujuan untuk menjaga serta mengamankan perdamaian dunia. Proses ini biasanya mengacu pada penyebaran pasukan nasional atau multinasional untuk membantu mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi atau berpotensi terjadi di dalam maupun antar negara.²² Pasukan yang bertugas dikerahkan berdasarkan persetujuan antara pihak yang berkonflik untuk mendukung tindakan perdamaian, sebagaimana yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan mandatnya tidak ada penggunaan kekuatan militer seperti senjata. Namun apabila terjadi kegagalan dalam suatu proses gencatan senjata, pasukan MPP PBB berhak turun tangan dan menggunakan senjata yang tentunya sesuai dengan otorisasi DK PBB. *Peacekeeping* memiliki kekuatan yang unik, termasuk legitimasi, kemampuan untuk mengirim dan mempertahankan pasukan baik militer dan polisi dari berbagai dunia, serta mengintegrasikan mereka dengan penjaga perdamaian sipil agar mandat bergeser ke arah yang lebih multidimensional.²³ UN *peacekeeping* didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu:

²² Encyclopedia Prinetoniensis. "Peacekeeping / Peace Enforcement. New Jersey: Princeton University. Diakses dari <https://pesd.princeton.edu/node/561> pada 20 Oktober 2021.

²³ United Nations Peacekeeping. "What is Peacekeeping". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping> pada 20 Oktober 2021.

consent (persetujuan para pihak), *impartiality* (ketidakberpihakan), dan *non-use of force* (tidak adanya penggunaan kekerasan) yang dipaparkan lebih jelas dalam BAB II.

Guna mendukung pelaksanaan *peacekeeping* beberapa aktivitas / kegiatan pendukung terlibat didalamnya, seperti: *conflict prevention and mediation* (prevensi konflik dan mediasi), *peacemaking* (perdamaian), *peace enforcement* (pasukan perdamaian) , serta *peacebuilding* (pembangunan perdamaian).²⁴ *Conflict prevention* serta *peacemaking* dilaksanakan dengan melibatkan aktivitas yang bersifat diplomatis untuk menjaga perselisihan yang terjadi antar-negara atau intra-negara. Tujuannya untuk menghindari konflik yang mengandung kekerasan. Meskipun serupa, *conflict prevention* dan *peacemaking* memiliki peran yang sedikit berbeda. Apabila *conflict prevention* berorientasi pada proses perdamaian seperti peringatan, pengumpulan informasi, serta analisis yang mendalam seperti mediasi konflik, *peacemaking* berorientasi pada hasil. Hasil diwujudkan melalui kinerja pasukan yang dikirimkan di bawah mandat Sekretaris Jenderal PBB sebagai fasilitator perdamaian, seperti pasukan dari suatu organisasi regional, negara, maupun dari PBB itu sendiri. Pasukan tersebut dikenal sebagai *peace enforcement*, di mana mereka dapat menggunakan kekuatan militer seperti angkatan bersenjata apabila situasi yang terjadi mengancam perdamaian dunia, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Untuk menjaga serta meminimalisir konflik agar tidak terulang kembali, peran serta kapasitas pasukan perlu ditingkatkan melalui *peacebuilding*. Kegiatan ini berfokus pada situasi pasca-konflik serta proses agenda

²⁴ *United Nations Peacekeeping*. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/terminology> pada 20 Oktober 2021.

yang luas untuk mencapai perdamaian berkelanjutan. *Peacekeeping* serta keempat aktivitas / kegiatan tersebut harus berjalan secara beriringan serta memperkuat kegiatan satu dan lainnya, di mana kelima hal tersebut saling melengkapi satu dan lainnya.

Konsep kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan (*women empowerment*). Menurut Nayla Kabeer, pemberdayaan adalah sebuah perubahan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk menentukan pilihannya. Tidak berdaya berarti seseorang yang ditolak pilihannya. Pemberdayaan lahir dari adanya penolakan terhadap kemampuan seseorang untuk membuat pilihan. Sehingga pemberdayaan merupakan sebuah alat yang digunakan bagi seseorang yang ditolak pilihannya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya mereka berhak untuk menentukan pilihan. Kabeer mengatakan bahwa “... *people who exercise a great deal of choice in their lives may be very powerful, but they are not empowered.*”, artinya seseorang yang memiliki kekuatan (*power*) belum tentu diberdayakan, namun seseorang yang diberdayakan sudah pasti memiliki kemampuan (*power*).²⁵

Konsep pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses yang dinamis, di mana perempuan memperoleh sumber daya yang mempermudah mereka untuk menyalurkan suaranya. Hal ini dapat diperoleh melalui 3 hal yang saling berhubungan antara satu dan lainnya serta berlaku baik secara individual maupun komunitas / kelompok, yaitu:

²⁵ Kabeer, Naila. 2005. “Gender Equality and Women’s Empowerment: a Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal”. *Oxfam*, hal. 14.

1. Agensi (*agency*)

Agensi mewakili proses yang didasarkan pada pilihan yang dibuat dan ditetapkan. Agensi terbagi atas agensi dengan konotasi positif serta agensi dengan konotasi negatif. Agensi positif berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk (*the power to*) memilih sebuah pilihan di hidupnya. Sedangkan agensi negatif berkaitan dengan kapasitas seseorang untuk mengesampingkan pilihan hidup orang lain melalui tindakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya (*the power over*). Pemberdayaan dalam konteks ini merupakan pemberdayaan dengan agensi positif, di mana perempuan memiliki harga diri yang berhak dihormati serta berhak bagi mereka untuk menentukan pilihannya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Kabeer bahwa: "*Empowerment is rooted in how people see themselves – their sense of self-worth.*"²⁶

2. Sumber daya (*resources*)

Sumber daya merupakan media untuk melaksanakan agensi. Biasanya mereka didistribusikan melalui institusi serta hubungan dalam masyarakat. Aktor tertentu memiliki posisi untuk menentukan bagaimana norma dan aturan diberlakukan, seperti kepala suku, kepala rumah tangga, direktur, manajer, ketua organisasi, dan sebagainya. Aktor tersebut atau dapat dikatakan selaku pemimpin organisasi / masyarakat, melihat serta menentukan prioritas mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Misalnya perempuan di wilayah Kongo secara terus menerus mendapatkan bentuk kekerasan seksual serta

²⁶ *Ibid*, hal. 15.

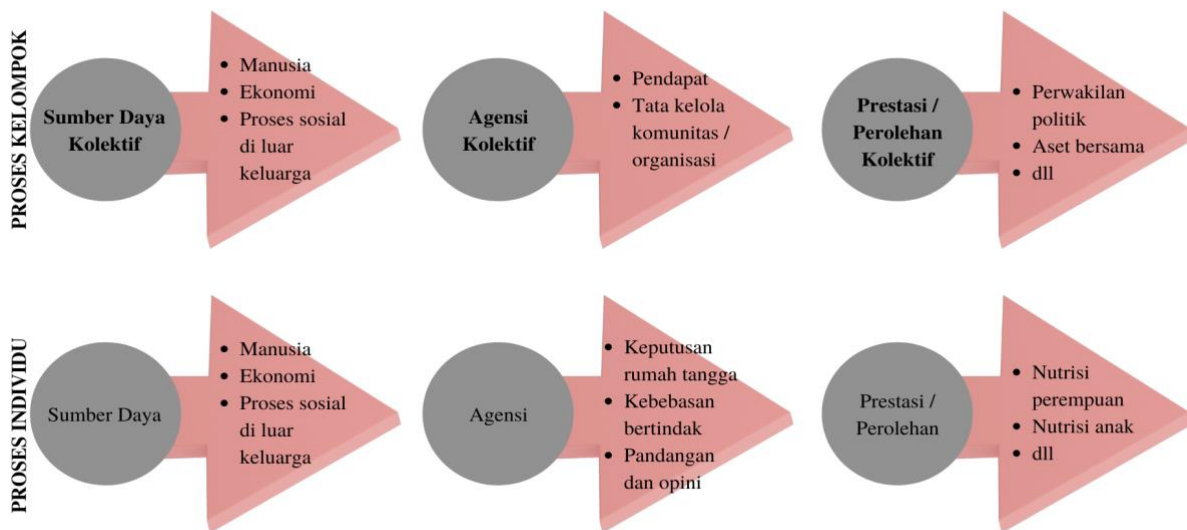
eksploitasi, maka dari itu lewat operasi perdamaian PBB di kirimkanlah pasukan perempuan sebagai media untuk memberdayakan perempuan di Kongo.

3. Prestasi / perolehan (*achievements*).

Keberhasilan agensi serta sumber daya dinilai dari prestasi / perolehan seseorang yang memberdayakan / diberdayakan. Berhasil atau tidaknya dilihat dari perubahan yang terjadi, di mana perempuan yang mendapatkan perlakuan subordinasi berhasil menegakkan haknya serta tidak terus bergantung pada sumber daya (*resources*) yang disediakan.

Gambar 1.1

Proses Pemberdayaan Perempuan



Sumber: Kabeer, Naila. 2002. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." The Hague: International Institute of Social Studies.

Ketiga hal tersebut merupakan proses yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan. Perubahan pada salah satu dari ketiga hal tersebut dapat merubah hal lainnya. Maka dari itu pemberdayaan pada perempuan difokuskan tidak hanya untuk mengatasi bentuk ketidaksetaraan gender, namun juga memberi proses perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Langkah awal (*agency*) merupakan langkah yang paling penting untuk dilaksanakan. Dengan hadirnya peran pasukan perempuan di MPP PBB, proses agensi dapat terlaksana dengan baik karena sesama perempuan memiliki rasa solidaritas yang tinggi serta membuahkan hasil (*achievements*) yang baik.

Teori dan konsep yang sudah dijelaskan dimanfaatkan dalam melakukan penelitian berikut. Paradigma liberalisme institusionalis dimanfaatkan untuk melihat bahwa konflik tidak lagi hanya berfokus pada ruang lingkup negara secara internasional, namun juga pada ruang lingkup domestik yang ada didalamnya. Organisasi internasional seperti PBB dibutuhkan untuk mencapai perdamaian dunia melalui kerjasama yang terjalin antar negara. Sedangkan konsep pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) dimanfaatkan untuk mengkolaborasikan bagaimana pasukan perempuan Indonesia memberdayakan perempuan di MONUSCO akibat pelecehan seksual dan eksploitasi.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Di dalam sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah metode penelitian, dimana terdapat keselarasan antara teknik dan alur pemikiran. Metode yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan pemahaman dasar Creswell, metode kualitatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena, yang dapat dilakukan melalui proses wawancara dan analisis data berupa teks.²⁷ Untuk memastikan data yang diperoleh merupakan data yang relevan, penulis mengambil data dari 3 atau lebih sumber yang berbeda (triangulasi). Dari data yang didapat, peneliti membuat interpretasi dan merenungkan serta menjabarkan hasil-hasil penelitian untuk dijadikan dasar penelitian. Seperti bagaimana kontribusi pasukan Perempuan Indonesia dalam pelaksanaan MPP PBB di MONUSCO.

1.6.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana segala gejala, fakta, serta realita digambarkan dalam bentuk teks untuk melengkapi data gambar dan angka yang ada.²⁸ Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini dinilai relevan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk kontribusi pasukan perempuan Indonesia di MPP PBB Kongo. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan Indonesia dalam MONUSCO yang dipaparkan menggunakan paradigma liberalisme institusionalis dan konsep pemberdayaan perempuan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yang mendukung

²⁷ Creswell, John. 1994. "Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches". London: *Sage Publications*.

²⁸ Raco, Dr. J. R, ME., M.SC. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya". Jakarta: *PT Gramedia Widiasarana Indonesia*, hal. 60.

seperti buku Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pembukaan UUD 1945 alinea IV, Resolusi DK PBB 2538, Resolusi DK PBB 1325, Peraturan Presiden terkait Misi Perdamaian Dunia, wawancara dengan Ibu Benedicta D. Kristiani, serta data lain yang mendukung. Ditambah data sekunder berupa artikel jurnal yang membahas mengenai peran pasukan perempuan Indonesia di MONUSCO serta situs internet seperti website PBB, MONUSCO dan KLN RI.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam menulis hasil laporan, penulis menyusun sistematika pembahasan dengan mendasarkan pada struktur general-spesifik-spesifik sebagai berikut:

- **BAB 1** membahas mengenai bagian pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (terdiri dari Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.
- **BAB 2** membahas pelaksanaan MPP PBB yang didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu: *consent*, *impartiality*, dan *non-use of force*. Dalam bab ini juga dibahas pentingnya pasukan perempuan yang diyakini dapat meningkatkan kinerja MPP dalam mencapai perdamaian dunia.
- **BAB 3** membahas bagaimana peran Indonesia dalam meningkatkan kontribusi pasukan perempuan di MPP PBB, yang meliputi landasan

hukum serta dasar kepentingan Indonesia. Pertimbangan Indonesia dalam mengirimkan pasukan perempuan, termasuk mekanisme pengiriman serta kesiapan Indonesia dalam mengirimkan pasukan MPP PBB juga dibahas dalam bab ini.

- **BAB 4** membahas bagaimana bentuk kontribusi pasukan Perempuan Indonesia di MPP PBB Kongo. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang dan tujuan Indonesia mengirimkan pasukan ke MONUSCO, bentuk kontribusinya, serta tantangan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan misi.
- **BAB 5** membahas mengenai kesimpulan.

